

Peran Klan dalam Pemilihan Kepala Kampung Tahima Soroma, Jayapura

Rosita P. Aronggear¹, Agustina Ivonne Poli², J.R. Mansoben²

¹ Mahasiswa Program Magister Antropologi, Universitas Cenderawasih, Jayapura

² Departemen Antropologi, Universitas Cenderawasih, Jayapura

Email Korespondensi: nadin.isabela@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Peran, Klan, pemilihan, Kepala Kampung, Tahima Soroma

Cara Sitasi:

Aronggear, R.P., Poli, A.I., Mansoben, J.R. (2020). Peran Klan dalam Pemilihan Kepala Kampung Tahima Soroma, Jayapura. *Cenderawasih: Jurnal of Antropologi Papua*, 1(1), 21-33.

DOI:

<http://dx.doi.org/10.31957/jap.v1i1.1379>

ABSTRACT

The encounter of regulations originating from the state with the culture of indigenous peoples has given birth to a new socio-cultural order. Like what happened in Pulo Village, during the election process for the village head, there was a negotiation process between state regulations and customary norms. For this reason, using an ethnographic approach, this study seeks to uncover how the role of clans in the election of village heads is related to the system of social stratification with relations between kin. The technique of selecting informants is determined purposively, with the data collection techniques used are observation and interviews. Data analysis includes data reduction processes, data descriptions and conclusions. The results showed that the social stratification of the Kayupulo people consisted of, Ondoafi, clan head Clans (upper class), Clan Members, and Migrant Communities. Then relations between clans are formed from economic activity and clan relations in exogamous marriages. The role of kin in the election of village heads is seen starting from the process of determining candidates for candidates through a process of customary consolidation that those who verify that they can nominate as village chiefs. Clans that were reclaimed as village leaders are carried out in turn from lines, Sibi, Yowe, Haay, and Soro for every one time tenure.

Copyright © 2020 CENDERAWASIH. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Sejak bergulirnya era otonomi khusus, Papua menjadi wilayah yang menjadi fokus pembangunan di Indonesia pada dua dekade belakangan ini. Sasaran yang ingin dicapai adalah diharapkan akan mensejahterakan kehidupan orang Papua, namun tetap pula menjaga ruh kearifan sebagai landasan dalam pembangunan maupun dalam mengeluarkan kebijakan. Tentunya hal ini pun berimplikasi pula pada perubahan struktur dan sistem pemerintahan yang sebelum dan setelah era otsus (Otonomi Khusus). Salah satu perubahannya adalah pergantian nama wilayah ditingkat kecamatan menjadi distrik serta hal lain. Tak terkecuali Kota Jayapura.

Kota Jayapura yang saat ini merupakan ibukota Provinsi Papua, telah menjelma menjadi kota metropolitan yang sangat padat, kompleks, dengan nuansa kehidupan urban yang begitu dinamis. Pemekaran-pemekaran wilayah administratif pun tak hentinya dilakukan dalam rangka mempercepat pembangunan. Namun dibalik kemegahan kota Papua, memunculkan sebuah ironi, yakni orang-orang Port

Numbay tersebar di 14 kampung (Kayo Pulau, Kayo Batu, Tobati, Enggros, Nafri, Skouw Sae, Skouw Mabo, Skouw Yambe, Mosso, dan Kampung Yoka) sebagai *indigeneous people* di Kota Jayapura termarginalisasi di kampung halaman mereka sendiri, di Port Numbay atau yang saat ini dikenal sebagai Kota Jayapura (Marten, ddk, 2019). Orang-orang port numbay banyak kehilangan tanah, terusir dan tak berdaya, akibat adanya persengsengketaan dengan para *corporate* yang mengakuisisi tanah hak ulayat mereka. Ketermarginalan orang Asli Port Numbay inilah yang membuat mereka menghimpun gerakan untuk memperjuangkan hak mereka secara adat, karena hanya dengan cara seperti itu mereka dapat tetap eksis dan dapat mempertahankan tanah hak ulayat mereka melalui legitimasi yang berasal dari negara (Idris, 2017).

Secara bertahap semenjak tahun 2006, pemerintah daerah Papua mengeluarkan kebijakan melalui regulasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah di tingkat kota dan kabupaten. Maka, ditetapkan pemekaran dan pembentukan beberapa kampung-kampung adat yang ada di setiap kabupaten/kota. Kota Jayapura sendiri telah ditetapkan 14 kampung adat orang Port Numbay yang merupakan wilayah adat orang port Numbay, yakni di kampung Kayo Pulau, Kayo Batu, Tobati, Enggros, Nafri, Skouw Sae, Skouw Mabo, Skouw Yambe, Mosso, dan Kampung Yoka. Jadi, walaupun Kota Jayapura secara administratif merupakan layaknya sama dengan kotamadya, akan tetapi juga memiliki unit wilayah terkecil seperti kampung selain kelurahan yang di bawah wilayah pemerintah di tingkat distrik.

Adanya penetapan 14 kampung tersebut menjadi kampung adat merupakan langkah agar menyelamatkan nilai-nilai, budaya dan hak-hak orang Asli Port Numbay dari derasnya arus modernisasi. Pembentukan 14 kampung adat ini kemudian melahirkan sebuah tataran pemerintahan yang "baru", yang mempertemukan regulasi dari negara dalam tata kelola pemerintahan, dengan nilai dan norma adat yang sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan. Pertemuan antara kedua sistem nilai atau landasan regulasi ini tentunya akan menarik untuk dikaji, karena akan memperlihatkan bagaimana proses tarik menarik dan daya tawar yang dilakukan oleh aktor dari kedua sumber regulasi dalam menjalankan kepemimpinan kewilayahan. Bahkan, dalam praktik pemilihan pemimpin atau kepala kampung pada kampung adat tersebut pun tidak serta merta hanya berlandaskan pada salah satu regulasi, melainkan mengawinkan kedua sumber itu, sebagai landasan dalam melegitimasi terbentuknya pemimpin wilayah kampung adat, yakni sebagai kepala kampung.

Dalam perkembangan masyarakat pada berbagai kebudayaan di dunia mulai dari kesatuan berbentuk masyarakat bergerombolan atau *band society* dan masyarakat tribal atau *tribal society* hingga masyarakat bercorak kepemimpinan penghulu suku atau *chiefdom*, peranan klen adalah sangat penting (Ferraro, 1995:242-246). Peranan klen dalam berbagai segi kehidupan meliputi system religi, system ekonomi dan system politik pada kesatuan-kesatuan masyarakat tersebut di atas adalah sangat terkait satu sama lain. Seorang pemimpin religi pada bentuk-bentuk masyarakat tersebut di atas adalah juga pemimpin politik dan pemimpin dalam berbagai segi kehidupan lainnya.

Hal yang sama terdapat juga pada masyarakat modern dengan system masyarakat bernegara atau *state society*. Kita bisa jumpai pada berbagai negara modern yang masih memegang teguh pada system-sistem kerajaan dan kesultanan baik di Eropa maupun Asia seperti kerajaan-kerajaan Inggris, Belanda Belgia di Eropa, dan di Asia seperti keajaan Saudi di Arab, kerajaan Brunai di Malesia serta kesultanan-kesultanan Ternate dan Yogyakarta di Indonesia. Peranan klen dalam masyarakat bernegara modern pada masa sekarang masih penting dan relevan dalam penyelenggaraan system

pemerintahan modern, meskipun kadar perannya berbeda-beda, ada yang sangat kuat tetapi ada juga yang sudah mulai berkurang perannya.

Di Tanah Papua terdapat juga sejumlah masyarakat yang memiliki system kepemimpinan bercorak kerajaan dan keondoafian (*chiefdomship*) seperti yang telah disampaikan Mansoben dalam bukunya Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya (1995). Dalam masyarakat seperti ini peranan klen masih ada dan diupayakan untuk terakomodasi dalam system pemerintahan modern. Contoh seperti ini terdapat pada kepemimpinan di tingkat Kabupaten, misalnya di Kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten Kaimana para pemimpin bupati pada beberapa waktu lalu dan pada waktu sekarang selalu diupayakan untuk berasal dari keturunan pemimpin kerajaan pada masa lalu. Apakah hal yang sama terjadi juga pada tingkat pemerintahan kampung terutama pada kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung system kepemimpinan ondoafi di wilayah budaya Mamta lebih khusus lagi di kampung Tahima Soroma? Keingintahuan terhadap fenomena inilah yang menjadi alasan mengapa topic ini diangkat untuk diteliti. Untuk itu, Kajian ini membahas mengenai kepemimpinan pada masyarakat adat kampung Tahima Soroma yang penganut sistem kepemimpinan keondoafian. Secara spesifik saya lebih menfokuskan kajian bagaimana peran klan dalam pemilihan kepala kampung Tahima Soroma.

2. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deksriptif kualitatif yang menekankan pada proses dan makna, sehingga penelitian kualitatif terlebih dahulu membuat gambaran kompleks yang bersifat holistik, menganalisis kata-kata, memaparkan pandangan-pandangan informan secara rinci, dan melakukan penelitian secara alamiah. Karakteristik pokok dari pendekatan ini adalah kepeduliaan terhadap "makna", sebagaimana sifatnya yang *natural setting* (Creswell, 2012; Moleng 2014), yang difokuskan pada pembahasan mengenai peran klan dalam pemilihan kepala kampung Tahima Soroma, Kota Jayapura Papua.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Teknik observasi digunakan dalam proses penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap pemimpin adat dan sebaran klan yang terdapat di Kampung Tahima Soroma. Aktivitas pengamatan dilakukan secara langsung di lapangan, terhadap beberapa objek pengamatan dan lokasi penelitian. wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan. Informan diminta untuk menceritakan pengalaman serta perasaannya sehubungan dengan topik penelitian, yakni mengenai peran klan dalam pemilihan kepala kampung. Dalam wawancara ini peneliti membuat ataupun merumuskan kerangka dan garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan, meskipun tidak ditanyakan secara berurutan. Pelaksanaan wawancara informan bersifat naturalistik (apa adanya). Artinya diharapkan kejadian seperti apa yang dialami individu rata-rata setiap harinya tidak dipengaruhi oleh kehadiran peneliti.

Analisis data penelitian ini merupakan proses pengkajian hasil wawancara, pengamatan, dan dokumen yang telah terkumpul melalui penelitian lapangan. Analisis data meliputi tahapan Model analisis dilakukan secara interaktif, yang meliputi: (i) reduksi data, (ii) pemaparan data, dan (iii) simpulan, melalui pelukisan dan verifikasi

3. Hasil dan Pembahasan

- *Stratifikasi Sosial Orang Tahima Soroma*

Beberapa pemahaman mengenai stratifikasi sosial oleh beberapa teoritis seperti Talcott Parson; Weber; K. Marks; dan Petirim Sorokin seperti yang diungkapkan Soekanto (2009), mengungkapkan tentang adanya pola pelapisan sosial dalam masyarakat yang terbentuk sebagai implikasi dari hubungan-hubungan ekonomi seperti kepemilikan atau harta kekayaan dan ada pula yang terbentuk karena seseorang memiliki sesuatu yang dihargai atau dibanggakan dalam jumlah lebih dari pada yang lainnya.

Beberapa pendapat tentang penyebab stratifikasi sosial tersebut menunjukkan bahwa hal yang dimaksud sangat penting dibahas dalam kaitannya dengan masalah pengaruhnya dalam praktik politik dalam setiap pelapisan sosial yang ada dalam struktur suatu masyarakat. Pengetahuan mengenai pelapisan sosial berarti mengetahui dan mencari latar belakang pandangan, perspektif atau sifat-sifat yang mendasari kebudayaan dari suatu masyarakat. Selain itu, mengetahui pelapisan masyarakat dapat ditemukan penggambaran tentang bentuk hubungan-hubungan, kejadian-kejadian dalam peristiwa yang ada dalam masyarakat yang kemudian pada orientasinya ditujukan tentang pengaruhnya terhadap bentuk-bentuk tingkah laku segenap individu atau kelompok dalam masyarakat.

Pada sistem kekerabatan yang cikal bakal pelapisan sosial dikenal beberapa prinsip dalam karya pertama yang fundamental tentang sistem kekerabatan masyarakat manusia bersumber dari beberapa ahli antropologi seperti J.Lubbock; J.J. Bachhofen; J.F. McLennan; dan G.A. Wilken (Koetjaraningrat, 2005). Inti dari semua tulisan tentang semua sistem kekerabatan tersebut jika dilihat dari perspektif antropologi sosial memiliki fungsi dan tujuan yang sama yaitu sebagai acuan untuk bertindak, baik dalam kelompok maupun di luar kelompok. Beberapa prinsip pokok yang dapat ditarik dari berbagai sistem-sistem kekerabatan yang dianut dari beberapa kelompok masyarakat yaitu: Pertama, sistem kekerabatan masyarakat manusia bersifat dinamis dari satu pola ke pola selanjutnya sesuai dengan perkembangan kebudayaannya; Kedua, dalam sistem kekerabatan berlaku stratifikasi sosial dalam pembentukan dan pengembangan keluarga; Ketiga, adanya pengaruh adat istiadat terhadap pembentukan dan pengembangan sistem kekerabatan; Keempat, sistem kekerabatan dipengaruhi oleh unsur mitos baik dalam pembentukan dan pengembangan kekerabatan; Kelima, dalam sistem kekerabatan dikenal konsep keluarga inti dan bukan keluarga batih (Wouden, 1985).

Dalam konsepsi kelompok sosial juga, seseorang dikatakan berkerabat apabila orang tersebut mempunyai hubungan "darah" dengan seorang individu tadi, baik melalui ibunya maupun melalui ayahnya. Terbentuk hubungan darah antara satu orang dengan orang lain yang jumlahnya banyak, namun seseorang dapat mengenali silsilah kekerabatannya berdasarkan "kekerabatan biologis" dan dapat membedakannya dengan "kekerabatan sosiologis" (Meiyani, 2010:96). Selain itu, hubungan kekerabatan biologis dapat diketahui dari ciri-ciri tertentu seperti dapat menjadi ahli waris, berhak atas suatu gelar, berhak atas kedudukan tertentu dalam masyarakat dan lain sebagainya (Koetjaraningrat, 2009). Oleh sebab itu dalam menentukan posisi seseorang dalam suatu sistem kekerabatan berlaku beberapa prinsip keturunan yang dapat menjadi acuan menentukan posisi seseorang agar dapat digolongkan sebagai kerabat.

Prinsip dimaksud adalah: *Pertama*; prinsip patrilineal yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan pria, sehingga kelompok kerabat ayah termasuk dalam batas kekerabatannya, sedangkan semua kelompok kerabat ibu berada

diluar batas itu; *Kedua*, prinsip matrilineal merupakan kebalikan dari prinsip patrilineal; *Ketiga*, prinsip bilineal yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan pria dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, dan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan wanita bagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban pula, sehingga untuk keperluan-keperluan tertentu seorang individu menggunakan kedudukannya sebagai kerabat ayahnya, dan dikesempatan lain sebagai kerabat ibunya; Keempat, prinsip bilateral yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan pria dan wanita. Selain itu terdapat empat tambahan prinsip kekerabatan yang dikemukakan Koentjaraningrat (2009) berlaku bagi seseorang yaitu: Prinsip ambilineal, yaitu memperhitungkan hubungan kekerabatan dengan sebagian warga masyarakat melalui garis keturunan pria, dan sebagian warga masyarakat lain melalui garis keturunan wanita. Prinsip konsentris yang memperhitungkan hubungan kekerabatan dengan jumlah angkatan terbatas. Prinsip primogenitur yang memperhitungkan hubungan kekerabatan dengan sebagian warga masyarakat melalui garis keturunan pria dan wanita, akan tetapi berlaku bagi yang tertua saja. Prinsip ultimogenitur yang memperhitungkan hubungan kekerabatan dengan sebagian warga masyarakat melalui garis keturunan pria dan wanita, akan tetapi berlaku bagi yang termuda saja.

Munculnya pelapisan sosial juga dapat disebabkan karena kedudukan seseorang dalam masyarakat yang ditentukan berdasarkan besar kecilnya kekuasaan, kekayaan, kepandaian, keterampilan, pengetahuan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut sehingga menentukan posisi atau statusnya dalam pelapisan sosial. Perihal ini juga dipertegas oleh Koentjaraningrat (2009) dengan mengemukakan tentang sebab-sebab terjadinya pelapisan sosial seperti adanya: (1) kualitas serta keahlian, (2) senioritas, (3) keaslian, (4) hubungan kekerabatan dengan kepala masyarakat, (5) pengaruh dan kekuasaan, (6) pangkat, dan (7) kekayaan. Dari keseluruhan faktor penyebab terjadinya pelapisan sosial dapat dilihat dari sejumlah masyarakat di dunia. Dalam konteks stratifikasi sosial orang Papua., khususnya orang Tahima Soroma yang menganut sistem kepemimpinan keondoafian lebih bersifat stratifikasi sosial yang bersifat tertutup. Artinya stratifikasi yang diperoleh dan dilekatkan oleh seorang individu itu berdasarkan terberi dari garis keturunan yang tidak dapat ditawar lagi. Misalnya, pada orang Tahima Soroma stratifikasi terdiri dari, pertama kelompok pemimpin, kedua kelompok masyarakat biasa, dan ketiga kelompok masyarakat pendatang. Kelompok pemimpin atau kelas atas itu terdiri dari ondofole dan kepala-kepala marga. Atau klen.

Ondoafi yang menjadi pemimpin secara adat merupakan pucuk stratifikasi teratas pada orang Tahima Soroma. Karena corak kehidupan, di masa lalu (hingga saat ini, meskipun telah ada sedikit pergeseran) aturan adat, yang mengharuskan pemimpin untuk mengayomi anggota masyarakatnya, maka *Ondoafi* tak hanya sekedar pemimpin, tapi karena tugas dan perannya penting itu, menyebabkan ia memiliki prestise dan privilese yang lebih besar dibandingkan kelompok atau klan yang lain. Dengan demikian, *Ondoafi* secara tak langsung telah mendapatkan *power* dan status yang lebih tinggi sehingga menempati posisi puncak dalam stratifikasi sosial orang Tahima Soroma.

Orang Tahima Soroma menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal, artinya mereka menarik garis keturunan dari sang ayah untuk menjadikan seorang individu untuk mewarisi, nama klan atau fam. Begitu juga misalnya dengan *ondoafi*. Hanya keturunan anak laki-laki dari *ondoafi* yang dapat mewarisi, tahta keondoafian. Meskipun anak perempuan dari seorang *ondoafi* juga merupakan keturunan dari *ondoafi*. Namun, jika anak perempuan dari *ondoafi* telah menikah dengan klan lain, maka anaknya tak bisa mendapatkan nama fam dari *ondoafi*. Misalnya keturunan

ondoafi dari orang Tahima Soroma diwarikan dalam klan Sibi, karena klan Sibi merupakan klan tertua di kampung Tahima Soroma, jadi seluruh keturunan anak laki-laki dari Klan Sibi merupakan pewaris keondoafian atau pemimpin adat, bagi orang Tahima Soroma. Berikut penuturan salah seorang informan mengenai hal tersebut :

Iya, kalo ondoafi itu dari marga Sibi. Karna mereka marga pertama dari dulu yang keturunan ondoafi dari marga Sibi. Ondoafi dari marga Sibi ini membawahi empat suku (marga), seperti Sibi, Haay, Yowe, dan Soro. (LH, 10 Januari 2020)

Pemaparan informan menunjukkan bahwa, klan Sibi sebagai pewaris ke- Ondoafi-an membawahi 4 klan, yakni Haay, Yowe, dan Soro. Hal ini menyiratkan bahwa terdapat 4 klan asli/awal di kampung Tahima Soroma. Klan Sibi merupakan Klan tertua dibandingkan klan yang lain, sehingga pemegang keondoafian hanya berasal dari klan mereka. Kekuasaan Ondoafi dijustifikasi melalui pewarisan secara turun temurun. Dia memiliki tipe legitimasi tradisional. Menurut Charles F. Andrain, pembahasan legitimasi elit berkaitan erat dengan tipe-tipe legitimasi yang berangkat dari sumber kewenangan yang ada. Penjustifikasian elit untuk memerintah, dapat dibedakan menjadi lima tipe legitimasi, yakni tipe tradisional, tipe ideologis, tipe personal, tipe prosedural dan tipe instrumental (Haryanto, 2005: 154).

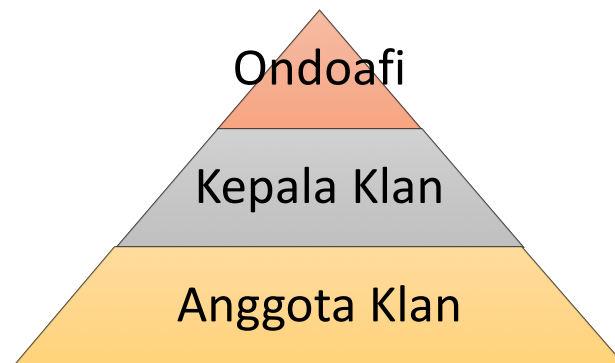
Elit dengan tipe legitimasi tradisionalnya memiliki hak untuk berkuasa didasarkan atas darah keturunan yang dimilikinya. Ondoafi adalah pemegang garis keturunan yang ditarik melalui garis lurus dengan pendiri kampung dan adalahanak laki-laki sulung Ondoafi sebelumnya. Jadi jabatan tersebut didasarkan pada prinsip primogenitur patrilineal. Implikasinya bahwa kedudukan pemimpin atau kepala di atas bersifat pewarisan, *ascribed* status. Dia legitimate untuk memerintah karena keyakinan-keyakinan lama yang ada dan masih berlaku di masyarakat yang bersangkutan mengharuskan begitu. Masyarakat lainnya yang diperintah menerima keadaan seperti ini sebagai kewajaran yang memang dibenarkan secara moral.

Ondoafi dapat juga disebut sebagai elit kultural. Dia menguasai sumber- sumber daya dan harta-harta bernilai dalam masyarakat yang menjadi alat pengikat sekaligus alat pengabsahan kekuasaan. Posisi Ondoafi terletak diruang sosial yang terdefenisikan oleh sejumlah modal yang dapat dipertanggungjawabkan (Bao, 2019). Modal itu memainkan peranan penting, karena modallah yang memungkinkan Ondoafi bertahan di dalamnya. Modal dimaksud adalah material yang menunjukkan penguasaan sumber daya, modal sosial yang berupa trust/relasi-relasi sosial, dan modal simbolik berupa kehormatan, kedudukan dan prestise.

Kemudian, berikutnya adalah kepala klan atau kepala keret, mereka adalah para pemimpin setiap klan. Peran mereka yakni mewakili anggota klan mereka jika ada pertemuan adat dan ada proses konsolidasi yang bertujuan untuk mengeluarkan kebijakan tertentu. Secara sederhana kepala klan merupakan pemimpin pada tataran klan atau marga. Kepala klan memiliki hak dan wewenang untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak dari klan mereka dan juga memiliki hak untuk mengatur anggota klannya. Secara tak langsung kepala Klan merupakan perpanjangan tangan dari Ondoafi, hanya saja kepala klan cukup mengurus internal dari klan mereka. Masing-masing marga yang ada di Tahima Soroma memiliki kepala Klan atau marga, baik pada Klan Sibi yang juga merupakan keturunan pewaris keondoafian, maupun masga yang lain, seperti marga Haay, Yowe, dan Soro.

Selanjutnya, yang menempati lapisan bawah adalah anggota dari setiap klan asli yang ada di Tahima Soroma. Mereka menempatkan posisi terbawah karena peran mereka secara adat tidak terlalu berpengaruh. Berikut gambar mengenai stratifikasi sosial orang Tahima Soroma :

Gambar 2. Stratifikasi Sosial orang Tahima Soroma



Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan bahwa stratifikasi sosial orang Tahima Soroma terdiri dari 3 tingkatan, yakni Ondoafi yang merupakan pemimpin tertinggi pada tingkatan kampung dan derajat sosial budaya yang dimiliki juga lebih dibandingkan yang lain, ondoafi bukanlah sekedar pemimpin yang memegang penuh *power* untuk mengatur secara adat dan seluruh sektor kehidupan orang tobatu yang berhubungan dengan adat istiadat mereka. Hal ini mencerminkan bahwa orang Tahima Soroma sebagai kelompok sosial, dipimpin oleh *Chieftdom* atau pemimpin dalam ruang lingkup internal mereka. Pada dasarnya penggolongan status setiap individu yang ada dalam kelompok tersebut berdasarkan status dan perannya, kemudian mengenai pendistribusian kekuasaan yang sangat terpusat, yakni berdasarkan keturunan patrilineal. Status individu dapat ditentukan oleh kedudukan di dalam satu kelompok keturunan. Sang pemimpin, kerap si pewaris jabatan, bertugas mempersatukan beberapa tingkatan hirarkis dalam menjalankan roda kepemimpinan sebuah kelompok maupun organisasi, dan dapat memiliki beberapa fungsi, baik sebagai orang yang mendistribusikan kembali sumberdaya, maupun sebagai juru adil yang merupakan hakim tertinggi dalam menyelesaikan sengketa dan konflik, dan juga sebagai pemegang otoritas atas fungsi-fungsi religius dalam kelompok (Coleman & Watson, 2005).

Keesing (1992) mengemukakan bahwa pemimpin tradisional pada tingkat lokal di kelompok etnis ataupun subetnis, adalah Pemimpin atau *paramount chief* dianggap memiliki kekuatan mutlak yang diberikan kepadanya oleh dewanya yang agung. Kekuasaannya terkonsolidasi dan dilaksanakan oleh para pendeta, penasihat, pemimpin militer, dan dirinya sendiri sebagai pemimpin. Dengan demikian, pemimpin tertinggi memadukan kekuatan-kekuatan sekuler dan kekuasaan keagamaan. Hubungannya dengan dewa menyiratkan bahwa ia lebih dari sekadar manusia yang fana, dan karenanya secara teori tidak bisa lagi dipertanyakan. Untuk itulah, kekuasaan yang dimiliki oleh Ondoafi menjadi mutlak dan absolut karena dilegitimasi oleh adat yang merupakan pedoman dalam berperilaku pada masyarakat tradisional.

Kemudian, kepala klan yang memiliki peran untuk mengatur anggota klan menempati posisi *middle* dalam hirarkis orang Tahima Soroma artinya kepala klan, bukanlah pemegang kekuasaan penuh tapi juga termasuk sebagai *elite* kelas 2 pada tataran stratifikasi sosial orang Tahima Soroma. Mereka memiliki *power* mengatur klan, tetapi di sisi lain juga mendapatkan akses untuk mewakili klan dalam proses pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh ondoafi, serta dapat terlibat dalam konsolidasi adat. Sedangkan anggota klan hanya sebagai konstituen dari pemimpin, baik pemimpin pada tingkat klan, maupun pemimpin pada tingkat keondoafian.

- **Relasi antar Klan pada Orang Tahima Soroma**

Klan atau nama keluarga adalah nama yang menunjukkan ciri sebagai pengenal seseorang yang menunjukkan asal-usul keluarga dan biasanya diletakkan di belakang nama diri. Klan ini menjadi identitas dalam masyarakat dan adat. Klan diturunkan dari ayah kepada anak-anaknya (patrilineal), yang merujuk kepada nama keluarga dan umumnya klan dicantumkan pada bagian belakang nama setelah nama diri. Nama klan/fam lazimnya digunakan secara kolektif oleh suatu kelompok masyarakat yang terikat dalam suatu sistem kekerabatan dan atau kekeluargaan secara turun-temurun dan merupakan ciri pengenal garis keturunan umum atau kolektif bagi seluruh anggota keluarga/klan/fam tersebut (Koentjaraningrat, 2009).

Nama keluarga/klan/fam di Indonesia meskipun berfungsi sebagai ciri pengenal kolektif, namun memiliki perbedaan secara etnik, seperti halnya masyarakat di Batak, Minahasa, dan Indonesia bagian Timur tanpa menyandang status sosial. Nama klan/fam merupakan produk budaya kolektif dalam sistem kekerabatan masyarakat. Pada etnis tertentu di Indonesia, misalnya, orang Jawa dan Sunda tidak lazim menggunakan nama klan/fam, tetapi pada golongan tertentu menggunakan gelar adat/kebangsawanan. Klan (*Clan*) sering juga disebut kerabat luas atau keluarga besar (klan). Klan merupakan kesatuan keturunan (genealogis), kesatuan kepercayaan (religiomagis) dan kesatuan adat (tradisi). Klan adalah sistem sosial yang berdasarkan ikatan darah atau keturunan yang sama umumnya terjadi pada masyarakat unilateral baik melalui garis ayah (patrilineal) maupun garis ibu (matrilineal) (Keesing, 1992).

Terkait mengenai relasi antar klan pada orang Tahima Soroma adalah dapat ditelusuri berdasarkan asal-usul dan bagaimana interaksi mereka dalam menjalankan kehidupan kesehariannya. Dalam pembahasan ini saya memulainya dengan menyelami asal-usul orang Tahima Soroma untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Klasifikasi klan didasari pada asal-usul keberadaan mereka di kampung Tahima Soroma yang dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, klan tertua di Kampung Tahima Soroma adalah klan Sibi. Untuk itulah Klan Sibi merupakan pewaris keturunan keondoafian yang menjadi pemimpin secara adat. Klan Sibi merupakan Klan tertua sebagai pembakal kampung di Tahima Soroma. Bahkan salah satu tokoh adat mengatakan bahwa "*ketika bumi diciptakan oleh Tuhan, mereka pun juga ada di situ*". Asal-mula keberadaan Klan Sibi dikaitkan dengan suatu hal yang bersifat supranatural dan metafisik, menyatukan asal-usul kejadian dari kehadiran mereka dengan alam dan keilahian, sehingga penyatuan ketiga elemen tersebut menjadi perekat dalam membentuk identitas mereka sebagai orang asli Tahima Soroma. Artinya dengan menjadikan hal itu sebagai acuan, klaim sebagai klan tertua di kampung Tahima Soroma menjadi absolut. Setelah itu Klan berikutnya adalah Klan Haay.

Kedua, Klan yang datang setelah adanya klan awal, seperti Sibi dan Haay yang merupakan klan tertua di kampung Tahima Soroma. Mereka adalah Klan Yowe dan Soro. Klan Yowe membawahi dua mata rantai rumah, yakni numhawi dan rey. Untuk itu mereka memiliki kepala suku sendiri, ondoafi sendiri. Akan tetapi ondoafinya berada di kampung Kayubatu, yang berasal dari numhawi, sedangkan rey yang menetap di kampung kayu Puol. Sedangkan, Soro, merupakan klan pesuruh dari ondoafi, pada saat dilangsungkan ritual adat keondoafian, klan Soro yang bertugas untuk membantu, klan Sibi dan keluarga ondoafi untuk melaksanakan ritual dan membantu menyiapkan makanan untuk disantap bersama-sama masyarakat kampung Tahima Soroma.

Jadi, berdasarkan pemaparan di atas mengenai asal-usul klan yang ada di Kampung Tahima Soroma adalah klan terbagi menjadi dua, yakni klan yang awal ada di kampung Tahima Soroma, yakni klan Sibi dan Haay. Kemudian setelahnya adalah klan Yowe dan Soro. Dari asal-usul kedatangan mereka di kampung Tahima Soroma, dapat diuraikan relasi yang terbangun, artinya misalnya relasi antar Sibi dan Haay sejajar dalam adat. Begitupula dengan pola hubungan yang terbangun. Sangat jauh berbeda hubungan yang terbangun dengan klan yang datang sesudahnya yakni, antar klan Sibi dengan klan Soro yang menunjukkan pola hubungan yang hirarkis. Karena, dikatakan bahwa klan Soro adalah pesuruh dari klan Sibi. Artinya relasi yang terbangun bersifat hirarkis. Bahkan, pada zaman awal-awal kedatangan mereka, klan Sibi sangat pantang untuk menjalin hubungan yang setara, misalnya perkawinan. Klan Sibi sangat pantang untuk melakukan perkawinan dengan klan Soro. Akan tetapi semakin zaman bertambah maju. Hal perbedaan kasta seperti itu telah mulai memudar. Meskipun, pada saat perhelatan adat, ataupun klan Sibi melangsungkan sebuah kegiatan, tetap klan Soro datang untuk membantu mereka. Namun, bukan berarti klan Soro masih menjadi "pesuruh" klan Sibi. Akan tetapi, lebih sebagai bentuk pelaksanaan peran dalam adat yang menangani urusan domestik persiapan penyelenggaraan ritual ataupun pesta adat, atau pesta keluarga dari klan Sibi.

Kemudian setelah asal-usul, adalah hubungan perkawinan. Walaupun telah disinggung di atas mengenai perkawinan, tetapi pada penjabaran kali ini akan dibahas secara mendalam mengenai relasi perkawinan antar klan yang ada di Kampung Tahima Soroma. Orang Tahima Soroma menganut sistem kekerabatan Patrilineal, yang pewarisan nama fam atau klan didasarkan pada pihak laki-laki. Karena, mereka menganut sistem patrilineal, jadi sering kali terjadi perkawinan lintas klan untuk mempererat solidaritas antar klan yang ada di kampung Tahima Soroma. Misalnya perkawinan antar klan yang terjadi adalah perkawinan antar klan Sibi dan Klan Yowe. Pihak laki-laki dari klan Sibi sedangkan pihak perempuan dari klan Yowe. Nantinya jika kedua pasangan ini telah dikaruniai momongan dan telah mempunyai anak, maka anaknya hanya dapat mewarisi nama klan dari ayahnya. Jadi anaknya hanya mewakili nama klan dari pihak ayah, tetapi tidak untuk pihak ibu. Seperti halnya juga contoh yang terjadi, adalah yang menjabat sebagai kepala kampung saat ini, yakni bapak Leonard Haay, ayahnya dari klan Haay dan ibunya dari klan Sibi, tapi dalam nama fam atau klan yang dia warisi hanyalah berasal dari ayahnya, yakni yang berasal dari klan Haay.

Dengan demikian terkait dengan masalah perkawinan, orang kampung Tahima Soroma lebih mencirikan pola perkawinan eksogami klan, yang bertujuan untuk memperkokoh solidaritas antar klan. Pernikahan sesama klan, sangat tidak dianjurkan oleh orang Tahima Soroma bahkan hal tersebut disetarakan dengan hubungan *incest* yang dipercaya kalau melakukan hal tersebut dalam kepercayaan setempat akan mendatangkan malapetaka bagi mereka. Untuk itulah mengenai hal ini, perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan lintas klan. Selain itu, terdapat pula perkawinan antar orang Tahima Soroma dengan bukan orang Tahima Soroma.

Hasil penelitian Galis (1955: 47-48) serta hasil penelitian peneliti sendiri menunjukkan bahwa adat perkawinan pada orang Tahima Soroma adalah menganut prinsip exogami klan yang bersifat *indirect exchange marriage* atau perkawinan tukar tidak langsung. Prinsip perkawinan tukar tidak langsung membutuhkan paling sedikit tiga klan misalnya klan A, klan B dan klan C agar system perkawinan ini dapat berlangsung. Dalam prinsip perkawinan tukar tidak langsung ini klan A memberikan gadis untuk kawin di klan B, dan klan B memberikan gadis untuk kawin di klan C dan klan C memberikan gadis untuk kawin di klan A.

Berdasarkan prinsip perkawinan tersebut, maka klen Jouwe memberikan gadis untuk kawin di klen Sibi dan sebaliknya klan Sibi memberikan gadis kepada klen Haay dan klen Haay memberikan gadis kepada klen Jouwe. Sistem perkawinan demikian berfungsi pertama sebagai alat pemersatu untuk memperkuat kohesi social antar klen dan kedua sebagai alat untuk menjaga harmoni dan keseimbangan hubungan antar klen. Praktek relasi social melalui pranata perkawinan seperti penjelasan di atas memperkuat atau mendukung kerangka teori Radcliffe-Brown (1952) yang dijadikan kerangka teori analisis dalam penelitian ini. Pada prinsipnya teori struktur fungsional yang dikembangkan oleh Radcliffe-Brown menekankan pada pentingnya fungsi elemen-elemen, misalnya klen dan perkawinan, dalam suatu budaya untuk saling berinteraksi dalam rangka menjaga keberlangsungan atau eksistensi serta keseimbangan struktur social dalam masyarakat. Pada masa sekarang banyak orang Tahima Soroma kawin di luar kelompok komunitas atanya sendiri sehingga prinsip kawin tukar tidak langsung sudah memudar, sedangkan prinsip kawin di luar ken sendiri, *exogami clan*, masih kuat dipertahankan.

Kemudian, dalam bidang ekonomi. Antar klan tak hanya menjalankan aktivitas dalam hal penangkapan ikan secara individual, tapi pada saat-saat tertentu mereka pergi ke laut lepas secara berkelompok untuk menangkap ikan. Misalnya ketika bulan juni mereka ingin menangkap ikan terbang yang pada bulan tersebut muncul ke permukaan laut, untuk itu mereka berangkat secara berkelompok untuk menangkap ikan secara bersama-sama. Hasil nya nanti mereka bagi secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa orang Tahima Soroma masih menerapkan pola hidup secara komunal meskipun telah ada pergeseran, namun belum sepenuhnya hilang. Gotong-royong bekerja bersama, kemudian hasilnya dibagi rata adalah prinsip aktivitas ekonomi yang bersifat resiprositas dan simbiosis mutualis. Keberlangsungan hidup kelompok ditopang antar satu sama lain.

Dari seluruh uraian di atas terkait mengenai relasi antar klan pada kampung Tahima Soroma menunjukkan pola hubungan yang berlangsung adalah asosiatif. Hubungan yang harmonis antar klan, dipererat melalui perkawinan dan saling menopang dalam hal kegiatan ekonomi. Walaupun pada mulanya asal-usul klan terbagi menjadi dua, yakni yang lebih awal ada dan yang datang kemudian. Akan tetapi saat ini pola hubungan yang terjalin menjadi dua arah dan setara antar klan, dengan pola hubungan yang seperti itu menciptakan harmonisasi kehidupan dan memperkokoh solidaritas kelompok, sebagai orang Tahima Soroma. Jadi relasi antar klan terjalin secara baik dengan pola relasi yang rukun.

- ***Proses Pemilihan Kepala Kampung***

Regulasi pemilihan kepala Kampung/Desa secara nasional di atur dalam Pasal 39 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa : Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Turunan regulasi tersebut tertung dalam pasal 40 Perda Kota Jayapura No. 16 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Kampung, yang menyatakan bahwa Masa jabatan Kepala Pemerintah Kampung adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali. Untuk itu pada kampung Tahima Soroma merujuk pada landasan regulasi tersebut secara administratif dalam menentukan waktu pergantian pemimpin kepala kampung. Namun, bagaimanakah proses pemilihannya ? berikut pemaparannya.

Kampung Tahima Soroma dimekarkan menjadi sebuah wilayah administratif yang setara dengan kelurahan, tetapi menggunakan terminologi kampung. Karena alasan utama dari pemekaran kampung adalah pembentukan kampung Adat, bagi komunitas asli yang ada di Kota Jayapura. Dalam konteks kampung Tahima Soroma, saat pertama kali kampung Tahima Soroma menjadi wilayah administratif kampung, telah mengembangkan siasat ataupun strategi redistributif kekuasaan dalam penetapan kepala kampung.

Hal yang dilakukan adalah dengan memasukkan unsur adat atau mekanisme yang diatur oleh adat dalam proses penentuan pemimpin atau kepala kampung di kampung Tahima Soroma. Bapak Gaspers Sibi yang merupakan Ondoafi sebagai pimpinan tertinggi pada tingkat adat mengusulkan, bahwa bukan sembarang orang yang menempati posisi kepala kampung, bahkan harus sesuai dengan ajaran dan otoritas yang ada di adat dan nilai-nilai kepemimpinan secara adat yang dianut oleh orang Tahima Soroma. Untuk itu yang menjadi kepala kampung haruslah merepresentasikan orang Tahima Soroma, agar nantinya setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka kepala kampung dapat menyuarakan atau mendengar tuntutan dan keluh kesah warganya serta tak bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang dipegang teguh selama ini.

Dengan demikian, Ondoafi dengan kekuasaan dan otoritas yang dimiliki mengusulkan untuk penjaringan calon kandidat kepala kampung harus melalui persetujuan adat. Dengan kata lain, untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala kampung harus mendapatkan restu atau proses verifikasi dari dewan adat yang disertai uji kelayakan di dalamnya. Dalam proses penjaringan kandidat kepala kampung pertama ini menuai banyak drama yang berpanjangan, karena masing-masing perwakilan dari setiap klan ingin mengutus orang mereka untuk maju sebagai kepala kampung. Membaca situasi yang semakin tak terkendali ini, maka Ondoafi mulai mengeluarkan keputusan agar dapat memberi jalan tengah dari persoalan yang dihadapi. Yakni dengan memutuskan bahwa yang menjadi kepala kampung agar digilir pada setiap klan asli yang ada di Kampung kaupulo dan diganti setiap periode. Hal ini untuk mencegah adanya perpecahan dari internal kelompok mereka. Jadi pada periode tertentu salah satu dari keempat klan tersebut, Sibi, Haay, Yowe dan Soro sebagai kepala Sukub dapat menduduki posisi kepala kampung.

Berdasarkan arahan dari Ondoafi kampung tersebut maka yang menjadi kepala kampung pertama berdasarkan putusan adat yakni dari Klan Sibi, yakni Asper Sibi. Hal ini ditentukan berdasarkan putusan adat. Berdasarkan sifat dan karakter yang dimiliki kemampuan kepemimpinan, seperti wibawa, mengetahui aturan adat, jenjang pendidikan, serta kemampuan managerial. Karakter ini yang menjadi acuan dalam mempertimbangkan calon kandidat yang dapat diloloskan oleh dewan adat agar dapat maju sebagai calon kandidat. Biasanya kandidat yang didapatkan dari dewan adat hanya satu orang yang mengindikasikan bahwa kandidat tunggal pada pencalonan kepala Kampung. Setelah tahap penentuan kandidat ditentukan oleh adat, maka tahap berikutnya adalah tahapan yang berasal dari regulasi negara, misalnya proses pemilihan, tapi karena calon kandidat tunggal maka, otomatis langsung terpilih tanpa ada drama proses pemungutan suara. Setelah itu menunggu proses pelantikan dari Walikota.

Mekanisme penentuan kandidat dilangsungkan oleh dewan adat, dan pelantikan oleh pemerintah, dengan calon kandidat tunggal kepala kampung telah berlangsung selama 2 periode. Kepala kampung pertama berasal dari klan Sibi, yakni bapak Gasper Sibi, kemudian pada periode kedua adalah bapak Edward Yowe. Akan tetapi, pada periode kedua, bapak Edward Yowe yang sedang menjabat tersebut,

mencalonkan diri sebagai anggota DPR, kemudian dia pun terpilih. Pasca terpilihnya bapak Edward sebagai anggota DPR mulai membuat kekacauan dan menjadikan kekosongan kepemimpinan pada posisi kepala kampung di kampung Tahima Soroma.

Gejolak pun terjadi, di satu sisi, dari klan Yowe yang merasa masih masa jabatan dari Klannya belum habis, jadi menuntut bahwa yang menggantikannya harus dari kalangan klan Yowe. Tetapi klan lain juga telah ingin menggantikan, bahwa kalo sudah selesai memimpin dari kalanga klan Yowe seharusnya adalah dari klan berikutnya yakni klan Haay. Ditambah lagi dengan menuntutnya juga kalangan pendatang yang menetap di kampung Tahima Soroma, yakni orang-orang Buton yang memberi pendapat bahwa harus dilaksanakan pemilihan langsung. Membaca situasi ini Ondoafi mengambil keputusan untuk tetap menjalankan apa yang telah menjadi mekanisme penentuan pemimpin kampung secara administratif yakni harus melalui prosedural secara adat dalam penjangangan dan penetapan kandidatnya. Dewan adat memutuskan untuk mengganti Edward Yowe, adalah bapak Leonard Haay yang menjadi kepala kampung melanjutkan periode kedua.

Selama proses pemilihan kepala kampung pada periode kedua tersebut, banyak hal seperti kekacauan di kampung yang menjadikan lambatnya proses pelantikan kepala kampung pengganti pada masa jabatan periode kedua, di kampung Tahima Soroma. Bapak Leonard Haay hanya dapat menjabat selama 3 tahun. Saat ini Ondoafi yang menetapkan aturan adat mengenai penetapan calon kandidat kepala kampung berdasarkan klan telah meninggal, dan menjadi tantangan tersendiri dalam menentukan kepala kampung nantinya. Apakah masih menggunakan mekanisme yang lama atau melalui proses pemilihan dan siapa saja bisa mencalonkan diri sebagai calon kandidat kepala kampung.

4. Simpulan

Stratifikasi sosial orang Tahima Soroma terdiri dari Ondoafi, Kepala Klan, dan anggota Klan. Tingkatan pertama adalah Ondoafi yang merupakan pemimpin adat, tetapi juga merupakan status tertinggi yang menjadi kebanggaan seseorang. Sistem pewarisan keondoafian berdasarkan keturunan Patrilineal dan bersifat feodal. Kemudian tingkatan kedua adalah Kepala Klan sebagai pemimpin pada setiap marga. Kemudian yang terakhir adalah anggota klan yang merupakan konstituen dari pemimpin mereka, baik pemimpin pada tingkat keondoafian, maupun pada tingkat konfederasi klan atau marga. relasi antar Klan yang ada di Kampung Tahima Soroma telah mencakup seluruh aspek kehidupan. Keempat klan, Sibi, Haay, Yowe, dan Soro menjalin hubungan diberbagai hal. Seperti pada perkawinan, sistem kekerabatan, aktivitas ekonomi dan ritual tradisi yang dijalankan secara bersama. Aktivitas perkawinan dan hubungan kekerabatan yang terjalin adalah sering terjadi perkawinan lintas klan, untuk mempererat solidaritas antar kelompok.

Proses Pemilihan Kepala Kampung, Pemilihan kepala kampung dilaksanakan setiap 6 tahun sekali. Penetapan kampung Tahima Soroma sebagai salah satu kampung adat memperlihatkan adanya proses akulturasi dari prosesi pemilihan kepala kampung. Walaupun regulasi penetapan waktu pemilihan berasal dari negara, akan tetapi adat lebih berperan dalam proses penentuan calon kandidat kepala kampung. Proses pelantikan pun dilakukan secara formal berdasarkan regulasi negara tetapi juga terdapat ritual pelantikan secara adat yang menandakan seseorang yang dilantik resmi menjadi pemimpin kepala kampung, baik secara adat maupun normatif pemerintahan.

Menyimak apa yang telah dibuat oleh kepala adat, bapak Gaspers Sibi (almarhum) mengenai kebijakannya untuk mengakomodasi nilai-nilai adat ke dalam

nilai-nilai modern dalam aspek pemerintahan tingkat kampung melalui cara pergantian pemimpin kampung (kepala kampung) secara bergilir antar ke empat klen yang ada. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk menjaga kebersamaan, keharmonisan dan solidaritas yang tinggi antar warga masyarakat asli Kampung Tahima Soroma. Kebijakan untuk pelaksanaan pemerintahan kampung dengan cara penetapan pimpinan kampung (kepala kampung) secara bergilir demi terjaminnya kehidupan bersama yang tetap kuat dan harmonis seperti yang di lakukan oleh pimpinan adat di Tahima Soroma adalah sangat baik bagi keberlanjutan nilai-nilai adat dalam kehidupan bermasyarakat pada tingkat kampung. Kebijakan yang telah dibuat oleh pimpinan adat tersebut menunjukkan masih relevan dan berlakunya teori struktur fungsional yang dikembangkan oleh Radcliffe-Brown dalam masyarakat pada masa sekarang.

Referensi

- Bao, B. (2010). Kuatnya Kekuasaan Ondoafi Di Tengah Masyarakat Urban (Studi Tentang Kekuasaan Ondoafi Di Kota Jayapura Papua). *Jurnal Politica*. Vol 1, No. 2. Hal 46-58.
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ferraro, G. (1995). *Cultural Anthropology: An Applied Perspective*, Second Edition. New York: West Publishing Company.
- Galis, K. W. (1955). *Papua van Humbolt Baai*. Den Haag. Voorhoeve. Rijksuniversiteit Leiden.
- Haryanto. (2005). *Kekuasaan Elit : Suatu Bahasan Pengantar*, Yogyakarta, Politik Lokal dan Otonomi Daerah.
- Idris, U. (2017). Belimpun Taka Tugas Insuwai Taka Tapu: Orang Tidung, Marginalisasi dan perlawanan di Pulau Sebatik, Nunukan. *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia*, 2(2): 134-152.
- Keesing, R. M. (1992). *Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer (I&II)*. Erlangga : Jakarta.
- Koentjaraningrat. (2005). *Pengantar Antropologi II : Pokok-pokok Etnografi*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Mansoben, J.R. (1995). *Sistem Politik Tradisional Di Irian Jaya*. Seri LIPI-RUL No. 5. Jakarta: LIPI-RUL.
- Marten, T., Sukoco, S., Yeimo, H. (2019). *Orang Numbay yang tercerabut*. Available at <https://jubi.co.id/orang-numbay-yang-tercerabut/> diakses pada tanggal 19 Januari 2020.
- Meiyani, E. (2008). Bati Na Wija dalam Sistem Kekkerabatan Orang Bugis-Bone (Suatu Analisis Antropologi Sosial). *Disertasi*. Universitas Hasanuddin: Makassar
- Moleong, L. J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Radcliffe-Brown, A.R., (1952). *Structure and Function in Primitive Society*. Glencoe: Free Press.
- Soekanto, Soerjono. (2009). *Pengantar Sosiologi*. Rajawali Press : Jakarta.
- Wouden, F.A.E. van. (1985). *Klen, Mitos, dan Kekuasaan*. PT Grafiti Press, Jakarta.